

Penguatan Industri Galangan Kapal dan Pemanfaatan TKDN

Outlook Industri Perkapalan Nasional di Tengah Potensi Resesi Global

Kamis, 8 Desember 2022



ilmate.kemenperin.go.id



[Ditjen ILMATE](https://www.youtube.com/channel/UCDitjenILMATE)



[@ditjenilmate](https://www.instagram.com/ditjenilmate)

“..Sebagai negara maritim, Indonesia harus mengaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik..”

Joko Widodo
President Republik Indonesia



Dengan **17,5 ribu pulau** di dalam negeri,
Industri Maritim merupakan tulang punggung konektivitas Indonesia

VISI:

Terwujudnya industri maritim yang kuat, **berdaya saing global**, serta **berbasis teknologi** dan **inovasi** guna **menunjang perekonomian nasional**.



Berdaya Saing
Global



Inovasi Teknologi



Penunjang
Ekonomi

MISI:

1. Menjadi base load pembangunan kapal dalam negeri.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri maritim nasional.
3. Membangun industri maritim yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Indonesia menuju net zero emission.
4. Meningkatkan persebaran pembangunan industri maritim di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat konektivitas dan ketahanan nasional.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong investasi industri maritim.

INDUSTRI GALANGAN KAPAL

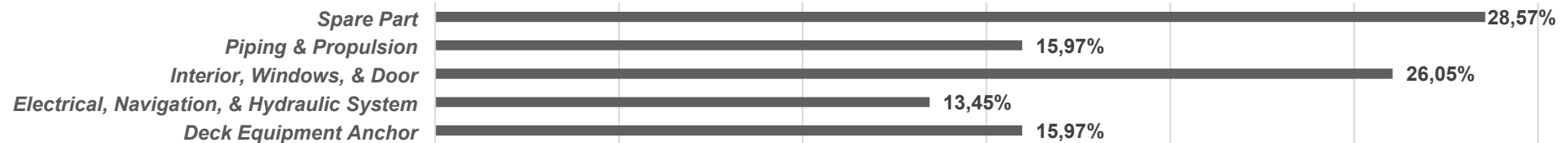


- Indonesia memiliki lebih dari **250 galangan** yang tersebar di **29 provinsi** dan lebih dari 70 kota/kabupaten.
- Fasilitas terbesar:
 - Graving Dock* : 300.000 DWT
 - Slipway* : 20.000 DWT
 - Building Berth* : 100.000 DWT
 - Floating Dock* : 100.000 DWT

INDUSTRI KOMPONEN KAPAL



- Indonesia memiliki **127 industri** komponen kapal dan bahan baku kapal yang terkonsentrasi di pulau **Jawa** dan **Kepulauan Riau**.
- Industri komponen kapal terbagi menjadi lima bagian, yaitu:



TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
produk kapal fiber dan perahu
25.3% - 56.6% (10 produk & 2 Perusahaan).



TOTAL TENAGA KERJA

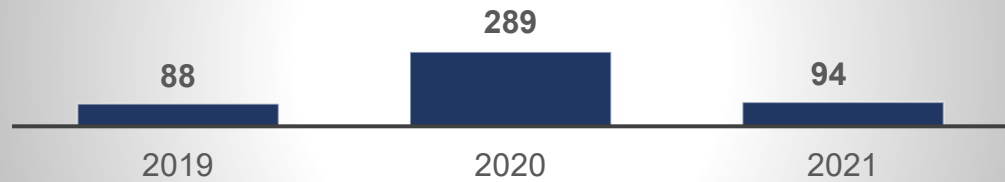


Total tenaga kerja industry galangan kapal yang diserap sebesar **46 ribu** orang.

Sumber: Mol

Ekspor dan Import Kapal Periode 2019 – September 2022

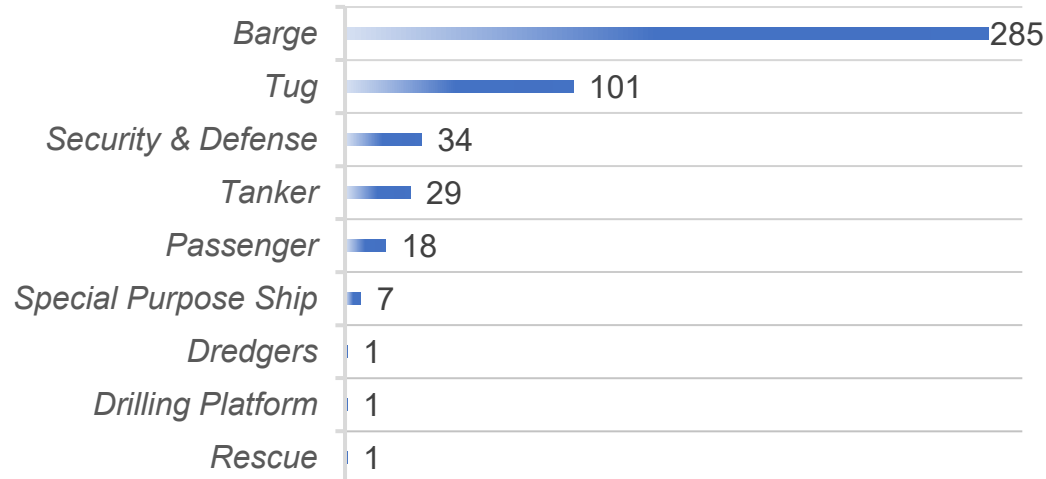
Produksi Kapal Periode 2019-2021



Sumber: Kemenperin

*dalam unit

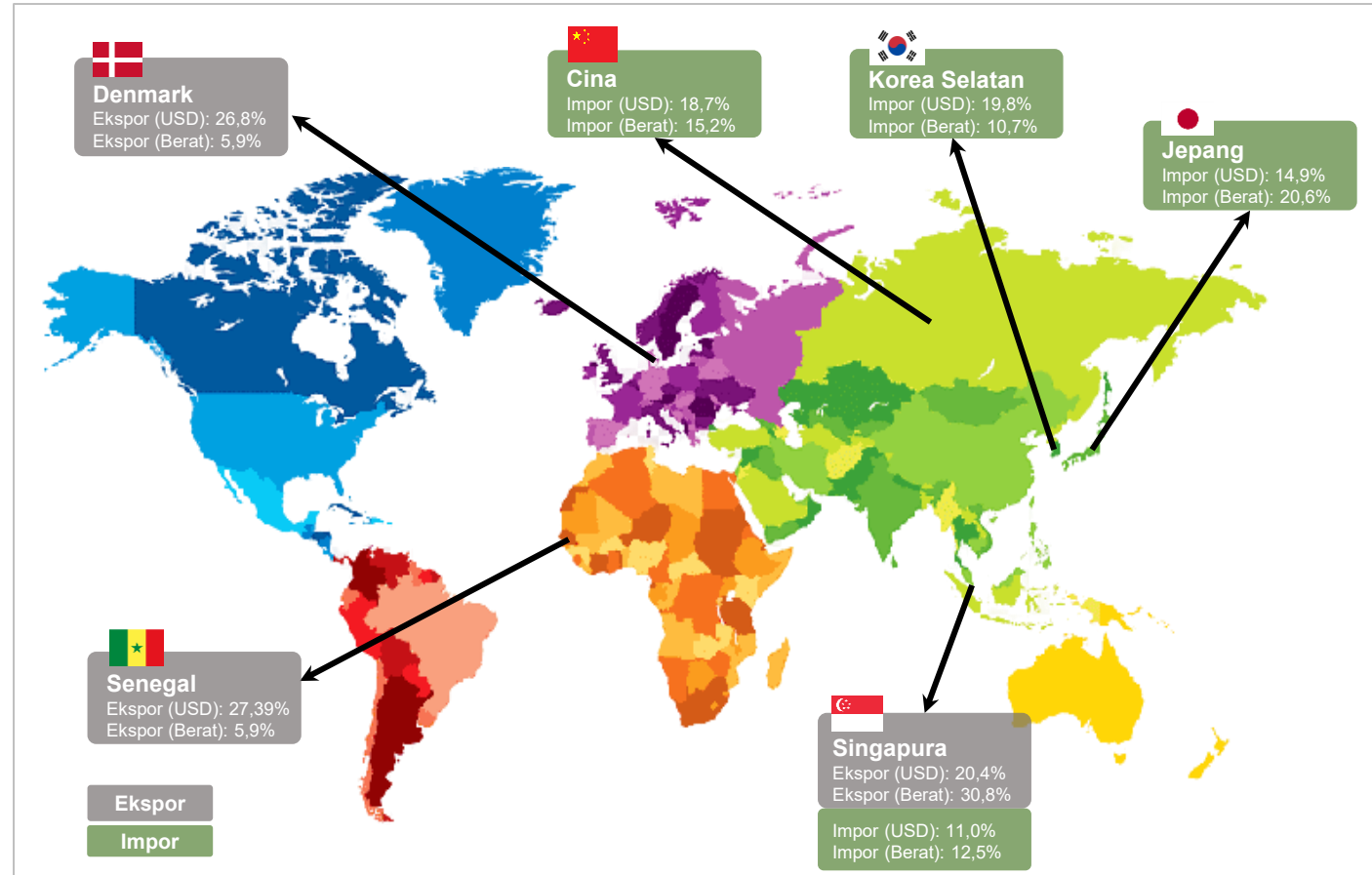
Total Kapal yang Diproduksi oleh Industri Galangan Kapal Dalam Negeri (2019-2021)



Total: 477 unit

Sumber: BKI

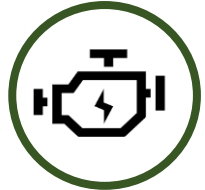
*dalam unit



Source: Mol

- **Total Ekspor: Rp 26,7 T** (Berat: 485,2 ribu ton).
- **Total Import: Rp 50,9 T** (Berat: 2,9 juta ton).

Proporsi ekspor terhadap impor pada periode 2019 – September 2022 sebesar **52,4%**.



Penguatan industri bahan baku dan komponen

Order pengadaan yang terbatas sedangkan nilai tambah produk sangat tinggi menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap bahan baku komponen impor



Order yang berkelanjutan

- Sektor ini sangat bergantung kepada order Pemerintah (Pusat & Daerah) dan BUMN/S sehingga diperlukan transparansi order pengadaan pemerintah baik jangka pendek, menengah dan panjang
- Kejelasan order tersebut akan membantu industri untuk melakukan investasi jangka panjang



Dukungan skema pembiayaan yang kompetitif

Industri ini dikategorikan “High Risk Business Loan” sehingga Lembaga pembiayaan cenderung menerapkan persyaratan yang sangat ketat seperti suku bunga tinggi, tenor jangka pendek, serta asset dan personal guarantee



Sertifikasi

Maritim adalah sektor yang sangat ketat terkait sertifikasi dalam rangka menjamin kelaiklautan, performa, dan kenyamanan



Standardisasi cost structure

Standardisasi cost structure pengadaan alat transportasi yang memiliki karakteristik job order diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat sekaligus mengurangi potensi resiko yang timbul pada saat audit



Dukungan SDM yang terampil dan kompteen

Produk alat transportasi memerlukan proses sertifikasi lengkap untuk menjamin keselamatan, unjuk kerja dan kenyamanan, sehingga diperlukan dukungan SDM industri yang trampil dan tersertifikasi



Penumbuhan industri di luar Pulau Jawa & Batam

Populasi industri di luar Pulau Jawa dan Batam yang masih sedikit dan kapasitas yang terbatas menyebabkan tingginya biaya operasional dan logistic

P3DN

dilakukan untuk
Pemberdayaan
Industri Dalam
Negeri

**Pasal
54**

Timnas P3DN
(diatur dalam
Keppres 24/2018)

**Pasal
73**

Tim P3DN
Dibentuk pada
setiap K/LN,LPNK, SKPD

**Pasal
74**

**Pengawasan
dan Sanksi**
Sanksi Administratif
& Finansial

**Pasal
76**

**Implementasi
Sanksi**
Lembaga Verifikasi,
Pejabat PBJ dan
Produsen/Penyedia

**Pasal
106-110**

PDN wajib digunakan

K/LN,LPNK,SKPD

- APBN/APBD
- Pinjaman/Hibah

BUMN/BUMD/Swasta

- APBN/APBD
- PPP
- Mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara

**Pasal
57**

Penggunaan PDN

Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan PBJ.

**Pasal
58**

Pengadaan PDN

- pengadaan Barang;
- pengadaan Jasa; dan
- pengadaan gabungan Barang dan Jasa

**Pasal
60**

TKDN

Wajib PDN bila terdapat PDN dengan jumlah nilai TKDN & BMP minimal 40% (dengan nilai TKDN minimal 25%)

Menteri Perindustrian menetapkan:

- Daftar Inventarisasi B/J PDN
- Batas minimal TKDN pada Industri tertentu

**Pasal
61**

Fasilitasi Pemerintah

- Preferensi harga atas PDN dengan nilai TKDN \geq 25%
- Preferensi harga PDN Barang paling tinggi 25%
- Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi oleh perusahaan DN paling tinggi 7,5% (di atas harga penawaran terendah perusahaan asing)

**Pasal
64**



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2011

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 29 TAHUN 2017

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 22 TAHUN 2020

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 06 TAHUN 2022

Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 TAHUN 2022

Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro



Amanat pada **UU 32/2014** tentang Kelautan **pasal 27 ayat (5)** yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melalui **Perpres 16/2017** tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan **Perpres 34/2022** tentang Rencana Aksi Kelautan Indonesia menyatakan bahwa penyusunan RPP Industri Maritim dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (Matriks Pilar KKI Ke-3 Tata Kelola dan Kelembagaan di Laut).

2022

Finalisasi Naskah Akademik dan *Draft* RPP Industri Maritim dan Jasa Maritim



Tahapan Penyusunan RPP Industri Maritim dan Jasa Maritim

Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK), Harmonisasi, dan Penerbitan PP

2023



Outline Naskah Akademik

- Bab 1 Pendahuluan
 - I. Latar Belakang:
 - II. Peran dan Tujuan Penulisan Naskah Akademik:
 - III. Batasan dan Ruang Lingkup Naskah Akademik
 - IV. Sistematika Penyajian
- Bab 2 Perkembangan dan Permasalahan Industri Maritim Nasional
 - I. Kinerja Industri Maritim Nasional secara Umum:
 - II. Kondisi Saat Ini:
 - III. Permasalahan Terkait:
- Bab 3 Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait
 - I. Landasan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, Inpres, Perpres, Permen)
 - II. Implementasi dan dampak terhadap industri maritim
- Bab 4 Kondisi yang Diharapkan dan Tantangannya
 - I. Visi, misi, dan tujuan industri maritim
 - II. Kondisi yang diharapkan:
 - III. Tantangan yang dihadapi:
- Bab 5 Strategi dan Program
 - I. Arah kebijakan strategis:
 - II. Strategi dan Program:
- Bab 6 Peta Jalan dan Rencana Aksi
 - i. Pentahapan dan Transformasi
 - ii. Sasaran pengembangan:
 - iii. Tahapan implementasi:
 - iv. Rencana aksi (setiap aspek):
- Bab 7 Penutup
 - I. Komitmen stakeholder:
 - II. Pelaksanaan
 - III. Monitoring dan evaluasi



Dasar Hukum: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020

Pemberiaan fasilitas skema khusus pembebasan bea masuk komponen kapal (Bab 98) hanya untuk industri **galangan kapal yang membangun kapal baru.**

Saat ini sudah ada **3 Perusahaan** yang telah menerima fasilitas ini, yaitu:

1. PT Galangan Kapal Yasa Wahana Tirta Samudera
2. PT Dumas Tanjung Perak Shipyard
3. PT Orela Shipyard

- Dasar Hukum: **Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019**
- Manfaat
 - ✓ **Perusahaan Industri Maritim** melakukan input laporan produksi sesuai dengan karakter bisnisnya.
 - ✓ **Kemenperin** memudahkan untuk melakukan analisa kinerja industri maritim secara tepat dan akurat.

Home > e-Reporting > Laporan Produksi > Produksi

▶ **Produksi**

Produksi ⓘ Ambil data Produksi dari laporan sebelumnya ⓘ

Untuk Bangunan Baru diisi perbaris hanya untuk 1 unit kapal

▶ **Bangunan Baru** [Tambah Data](#)

No.	Jenis Kapal	Nama Kapal	Jenis Material	Kode HS	Ukuran	Tanggal Kontrak	Tanggal Pengiriman	Nilai Kontrak (Rp.)	Pemesan	Dokumen Spesifikasi Teknis
Tidak ada data										

▶ **Reparasi** [Tambah Data](#)

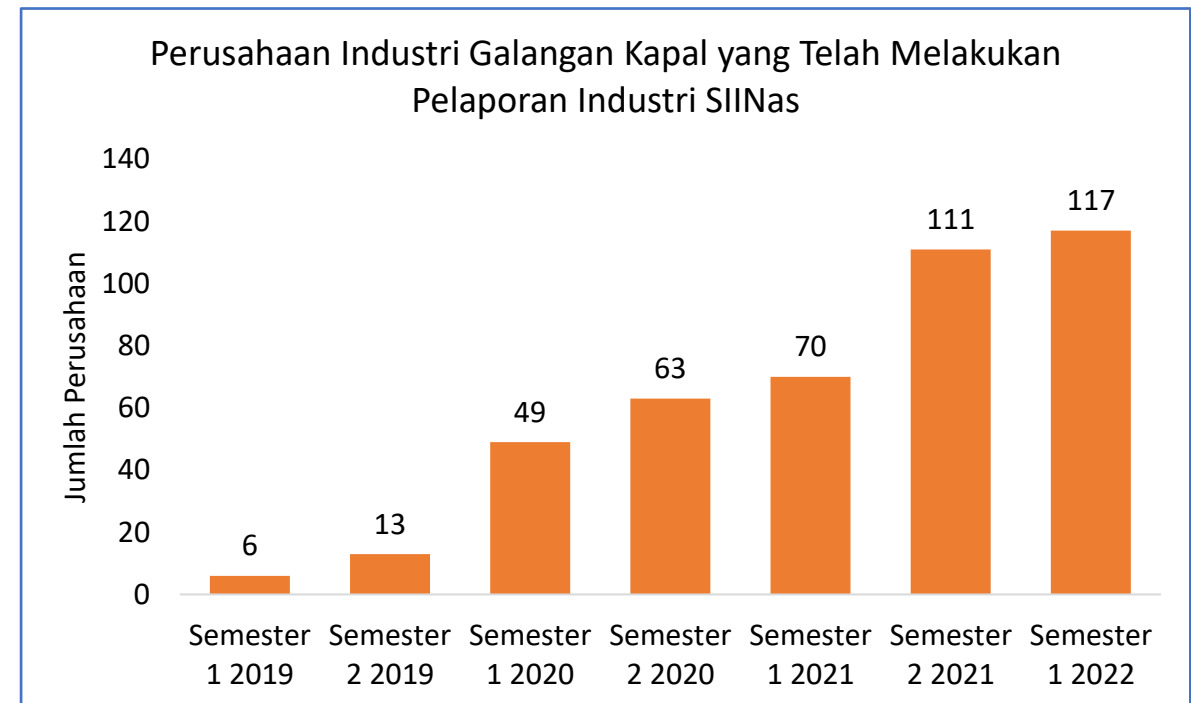
No.	Jenis Kapal	Jumlah
Tidak ada data		

▶ **Penutuhan** [Tambah Data](#)

No.	Jenis Kapal	Jumlah
Tidak ada data		

Langkah pengisian:

1. E-Reporting
2. Laporan Industri – Tahap Produksi



Sumber: Pusdatin (KBLI 30111, 30112, 30113 30120, 33151)



PELATIHAN PENINGKATAN SDM GALANGAN KAPAL

Sebagai negara maritim dengan 17.000 pulau, saat ini di Indonesia ada sekitar 33.000 kapal yang beroperasi. Untuk meningkatkan hal itu, pada Senin, 19 September 2022 diadakan kegiatan Pelatihan Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produk di Aula Kawah Wadling Indonesia Gedung C Jalan Raya Bringsi Nomor 21, Bringsi, Kecamatan Sumbikerp, Kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama "Indonesia Shipbuilding Modernization Project" antara pemerintah yang diwakili Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal ILMATE dan BPSDM, Japan International Cooperation Agency (JICA), serta didukung oleh Iperindo. Pelatihan tersebut akan meliputi lima tahap, yakni di Surabaya, Jakarta serta di Jepang. Sebagai tahap awal, pelaksanaan

pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan 20 perusahaan galangan kapal anggota Iperindo, terdiri atas 10 perusahaan di Surabaya dan 10 lainnya di wilayah Jakarta. Masing-masing perusahaan galangan kapal mengirimkan dua peserta. Para peserta mendapat bekal materi dari para instruktur ahli dari galangan-galangan kapal terkemuka di Jepang. Untuk memudahkan komunikasi, para instruktur asing itu dibantu para expert lokal, termasuk para ahli mantan pelaku PT PAL Indonesia yang juga pernah mengikuti pelatihan sejenis, baik di Jepang maupun di Indonesia. Anita memotivasi kerja cepat, praktis dan efisien mulai diperkenalkan di industri perkapalan karena ke depan kebutuhan penggunaan kapal di Indonesia akan terus meningkat. "Apalagi kalau bisnis pertambangan makin meningkat,

kapal mereka sendiri maupun kepada anggota Iperindo lainnya. Menurut Anita Jepang sudah menjadi mitra kerja sama karena di Negara Sakura itu terdapat sejumlah galangan kapal modern yang tidak diaku Anita. "Dengan dasar itulah kami yang di Indonesia ini perlu mempelajari nilai manajemen produksi maupun sisi teknik pembuatan kapal. Sebagai nantinya produksi kapal dari galangan-galangan di Indonesia mampu bersaing baik di tingkat nasional ataupun internasional," tutur Anita. Selama dua tahun, pelaksanaan pelatihan tidak hanya diadakan di Indonesia. Pada 2023 peserta juga diajak studi banding ke galangan kapal di Jepang. Peserta akan melihat bagaimana para pekerja di industri perkapalan Jepang bekerja secara efisien dan berkualitas. Studi banding, kata Anita, tidak semata untuk meningkatkan pemahaman tentang teori maupun wawasan pada para peserta, melainkan juga dimbang oleh praktik serta simulasi-simulasi mengenai apa saja yang perlu dilakukan bila melaksanakan pelatihan kali ini dapat pengembangan kapal di Indonesia. Anita berharap dari pelatihan ini lahir SDM-SDM yang kompeten serta memiliki strategi bagaimana membangun kapal dengan lebih baik lagi, baik secara kreasi, kualitas maupun manajemennya. Meskipun perubahan galangan kapal termasuk jenis industri padat karya, namun pelatihan ini tidak hanya membahas hal teknis. "Sed manajemen juga dibangun, itu tidak hanya membahas hal teknis," ujar Anita. Menurut Anita, manajemen pembuatan kapal tak kalah penting. Sebab sampai saat ini masih ditemui beberapa kendala mengenai kecepatan dan kualitas produksi. Dengan pelatihan ini, diharapkan tantangan tantangan yang timbul saat proses pembuatan kapal yang dihasilkan belum mampu bersaing. Sebab saat pembuatnya, kata dia, ada kelebihan-kelebihan penertihan yang belum terpecah pada industri galangan kapal, baik di sektor insentif pembayaran, suku bunga perbaikan, maupun insentif insentif lainnya. Dari sisi internal, Iperindo, ujar Anita, bermaksud meningkatkan hasil produksi yang tak kompetitif ini dengan cara meningkatkan kemampuan SDM. Dengan begitu penggunaan material-

terutama akan mendorong kami bisa membuat kapal yang berkualitas," kata Anita. Anita menilai Pelatihan Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produk tersebut sangat berguna bagi praktisi galangan kapal untuk makin memperbaiki pengalihan mereka tentang manajemen di satu sisi dan update soal teknik produksi kapal di sisi yang lain. Jepang sebagai negara industri maju di bidang perkapalan, kata Anita, layak ditiru oleh kita. "Kami ingin mencontoh sistem pembangunan kapal yang lebih modern di Jepang, serta pengoperasian alat-alat yang lebih sistematis maupun yang lebih canggih," kata dia.



Henna Martini
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian

menter yang tak perlu bisa dibatasi. "Tahap tujuan utama pelatihan ini," kata Anita. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Henna Martini mengawali produksi industri galangan kapal dalam negeri masih memiliki sejumlah kendala utama dalam memenuhi pemesanan pembangunan kapal dalam negeri. Di antaranya belum efisiennya prosedur dan tahapan pembangunan kapal, belum maksimalnya penerapan quality control dan assurance atau kapal yang dibangun, serta masih tingginya ketergantungan terhadap bahan komponen impor, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti mesin engine. "Hal tersebut menyebabkan pembangunan kapal di dalam negeri relatif lebih mahal dan lama jika dibandingkan dengan negara-negara pembangun kapal, seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan. Akibatnya, sebagian besar pemesanan perantara kapal dalam negeri masih didominasi oleh impor, baik kapal baru maupun kapal bekas," kata Hendro. "Alasan tersebut mendorong dibuatnya kegiatan Pelatihan Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produk. Melalui pelatihan ini, kita diajarkan prosedur pembuatan kapal yang efisien dan modern melalui kunjungan ke industri galangan kapal nasional yang memiliki reputasi kapabilitas, daya saing, serta keberlanjutan," kata Hendro.

Menurut Hendro setidaknya ada empat manfaat yang didapat peserta dari pelatihan tersebut. Pertama, menambah pengetahuan tentang optimalisasi kegiatan bisnis galangan kapal secara keseluruhan, termasuk pekerjaan pembuatan kapal baru dan reparasi melalui simulasi interaktif. Kedua, tata cara meningkatkan keberhasilan produktivitas masing-masing perusahaan galangan kapal. Ketiga, sistem pembangunan kapal yang modern serta adaptasi teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kapal baru. "Adapun keempat, kegiatan kunjungan di Jepang yang dapat memberikan informasi serta belajar tentang proses bisnis galangan kapal di Jepang, serta sistem yang mereka gunakan sampai budaya kerja di sana," tutur Hendro.



- ✓ Telah dilaksanakan **the 1st Joint Coordinating Committee** pada tanggal 7 Juli 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, telah dilakukan penanda-tanganan **Minutes of Meeting** antara Dit. IMATAP, JICA, dan IPERINDO
- ✓ Pelaksanaan pelatihan manajemen produksi galangan kapal akan dilaksanakan dalam **5 Tahap di Jakarta dan Surabaya** untuk setiap tahap, dan **1 pelatihan di Jepang selama 2 minggu, mulai 2022 s.d. 2024**

Tax Holiday

- Perusahaan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir berhak memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan). (hingga 100% dalam 5 hingga 20 tahun tergantung pada nilai investasi).

Tax Allowance

- Kelegaan bagi perusahaan yang berinvestasi di hampir 183 bisnis, termasuk pengurangan laba bersih hingga 30% dalam waktu 6 tahun; penyusutan dan/atau amortisasi dipercepat.

Pembebasan Bea Masuk Impor

- Pembebasan bea masuk untuk impor barang modal; dan bahan baku untuk produksi.

National Interest Account (NIA)

- Pembiayaan berupa pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor, dan asuransi yang ditujukan kepada badan usaha yang melakukan ekspor yang ingin mengekspor barangnya ke luar Indonesia.

Super Tax Deduction

- Pengurangan pendapatan kotor atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan R&D tertentu; dan/atau pengembangan manusia (Vokasi)

Meningkatkan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

- Preferensi untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan publik, sesuai dengan tingkat komponen dalam negeri minimum (TKDN) yang ditentukan oleh peraturan. Kementerian Perindustrian memiliki tim khusus yang akan membantu industri untuk mengukur, mensertifikasi, dan selanjutnya meningkatkan tingkat kandungan lokalnya.

13

Peta Jalan Pengembangan Industri Perkapalan Nasional

Periode	2023-2025	2026-2030	2031-2035
Peningkatan kapasitas terpasang industri galangan kapal di luar Pulau Jawa dan Batam.	10.000 DWT	30.000 DWT	> 30.000 DWT
Bangunan baru kapal			
<u>Kapal Tanker</u>	30.000 DWT	60.000 DWT	> 60.000 DWT
<u>Kapal Penumpang</u>	1.000 pax.	2.000 pax.	> 2.000 pax.
<u>Lainnya</u>	LCT, LPD, FPB, Corvette, Sub-Marine	Kapal-kapal khusus untuk aktivitas oil and gas, alpalhankam (kombatan & non-kombatan).	Kapal-kapal khusus untuk aktivitas oil and gas, alpalhankam (kombatan & non-kombatan).
Teknologi <i>Net Zero Emission</i>	Biofuel, Wind Propulsion, Onboard CO ₂ capturing, Biofouling, Onshore Power Supply, Engine Eff. System	LNG, LPG, Electrification	Fuel Cell
Tingkat Komponen Dalam Negeri(TKDN)	30%	40%	50%

Misi	Strategi	2023-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi Penanggung-jawab
Menjadi <i>base load</i> pembangunan kapal dalam negeri.	- Melakukan pengendalian impor kapal dan komponen kapal yang mampu diproduksi dalam negeri.				Kemendag, Kemenperin, Kemenhub
	- Optimalisasi pembangunan kapal yang dibiayai oleh APBN di galangan kapal dalam negeri.				Semua K/L, BUMN, BUMD
	- Optimalisasi peremajaan armada kapal niaga nasional melalui pemberdayaan industri perkapalan dalam negeri.				Kemenhub, Kemenperin, Industri Pelayaran Nasional
Memperkuat dan memperdalam struktur industri maritim nasional.	- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.				Kemenperin, Kemenko
	- Pengembangan industri bahan baku dan komponen industri maritim.				Kemenperin
Membangun industri maritim yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Indonesia menuju <i>net zero emission</i> .	- Peningkatan penguasaan teknologi dan rancang bangun produk maritim.				Kemenperin, BRIN, Perguruan Tinggi, Kemenhub, Biro Klasifikasi
	- Peningkatan kompetensi SDM industri maritim.				Kemnaker, Kemenperin
	- Penyediaan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas kepada industri yang mendukung target <i>net zero emission</i> sektor industri maritim.				Kemenperin, Kemenkeu, Kemenko, Kemenhub, KemenESDM, KLHK
	- Perumusan kebijakan SNI produk industri maritim.				BSN, Kemenperin, Biro Klasifikasi
	- Pengembangan <i>Ship Recycling Facility</i> (industri penutuhan kapal) dan <i>Platform Removal/Decommissioning</i> dalam mendukung <i>circular economy</i> .				Kemenko, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, Kemendag, Kemnaker
	- Penyusunan standar klasifikasi galangan kapal nasional.				Kemenperin, Biro Klasifikasi, IPERINDO, BSOA

Misi	Strategi	2023-2025	2026-2030	2031-2035	Instansi Penanggung-jawab
Menjadi <i>base load</i> pembangunan kapal dalam negeri.	- Melakukan pengendalian impor kapal dan komponen kapal yang mampu diproduksi dalam negeri.				Kemendag, Kemenperin, Kemenhub
	- Optimalisasi pembangunan kapal yang dibiayai oleh APBN di galangan kapal dalam negeri.				Semua K/L, BUMN, BUMD
	- Optimalisasi peremajaan armada kapal niaga nasional melalui pemberdayaan industri perkapalan dalam negeri.				Kemenhub, Kemenperin, Industri Pelayaran Nasional
Memperkuat dan memperdalam struktur industri maritim nasional.	- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.				Kemenperin, Kemenko
	- Pengembangan industri bahan baku dan komponen industri maritim.				Kemenperin
Membangun industri maritim yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Indonesia menuju <i>net zero emission</i> .	- Peningkatan penguasaan teknologi dan rancang bangun produk maritim.				Kemenperin, BRIN, Perguruan Tinggi, Kemenhub, Biro Klasifikasi
	- Peningkatan kompetensi SDM industri maritim.				Kemnaker, Kemenperin
	- Penyediaan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas kepada industri yang mendukung target <i>net zero emission</i> sektor industri maritim.				Kemenperin, Kemenkeu, Kemenko, Kemenhub, KemenESDM, KLHK
	- Perumusan kebijakan SNI produk industri maritim.				BSN, Kemenperin, Biro Klasifikasi
	- Pengembangan <i>Ship Recycling Facility</i> (industri penutuhan kapal) dan <i>Platform Removal/ Decommissioning</i> dalam mendukung <i>circular economy</i> .				Kemenko, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, Kemendag, Kemnaker
	- Penyusunan standar klasifikasi galangan kapal nasional.				Kemenperin, Biro Klasifikasi, IPERINDO, BSOA
Meningkatkan persebaran pembangunan industri maritim di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat konektivitas dan ketahanan nasional.	- Pembangunan sarana dan prasarana industri maritim.				KemenBUMN, Kemenhub, KKP, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemhan
	- Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukkan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah.				Kemenperin
	- Penetapan wilayah pengembangan industri (WPI).				Kemenperin
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong investasi industri maritim.	- Pemberian fasilitas insentif fiskal (PPH, PPn, dan bea masuk)/ nonfiskal (konsesi, perizinan, dan kepastian sewa lahan) bagi industri maritim.				Kemenkeu, Kemenperin, KemenBUMN, Kemenhub
	- Pemberian skema pembiayaan yang kompetitif yang bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.				Kemenperin, Kemenkeu, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi, BI, OJK
	- Perumusan kebijakan <i>cost structure</i> pembangunan kapal baru.				Kemenperin, LKPP, KPPU
	- Perumusan kebijakan standar tarif reparasi kapal.				Kemenperin, LKPP, KPPU
	- Fasilitasi promosi industri maritim dan peningkatan literasi kepada lembaga pembiayaan dan asuransi.				Kemenperin, Kemenko, Kemenkeu, Perbankan, Lembaga Asuransi

Terima Kasih!
Thank You

Rabu, 7 Desember 2022